



EDITORIAL:

Diaspora dalam Hubungan Internasional

Perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung hingga pertengahan 2022 ini menyisakan perhatian pada diaspora, selain pada segala akibat perang dalam banyak hal terhadap kedua negara dan hubungan internasional. Diaspora Rusia dan diaspora Ukraina tersebar di luar negeri, baik sebagai diaspora pasif maupun sebagai diaspora transnasional dan global. Dalam banyak kepentingan mereka adalah subjek-subjek internasional yang signifikan baik bagi negara asal (*home country*) dan negara tuan rumah (*host country*) maupun bagi ragam komunitas diaspora lainnya. Namun, serangan militer Rusia ke Ukraina telah membuat diaspora Rusia dalam keadaan sosial yang tersudutkan di tempat mereka berdomisili. Sementara para pengungsi Ukraina yang mendapatkan simpati sebagai migran baru akan mengalami kehidupan diaspora di negara penerima di masa depan bila mereka menetap. Dari tempat baru, mereka dapat berfungsi sebagai saluran politik domestik dan internasional untuk konflik dan iredentisme guna "memulihkan" identitas dan wilayah yang telah dianeksasi pihak musuh. Selanjutnya, efek terkuat perang Rusia dan Ukraina terhadap risiko perang berikutnya bekerja melalui diaspora adalah sesuatu yang mungkin.

Kata diaspora berasal dari bahasa Yunani "dia" (melalui) dan "spiro" (menabur, menyebarkan) (Cohen, 1996). Secara harfiah istilah diaspora berarti "hamburan" atau "penyebaran" (Khara, 2020). Diaspora dimaknai sebagai populasi tersebar yang asalnya terletak di lokasi geografis yang terpisah. Dengan kata lain diaspora digunakan untuk

menggambarkan orang yang mengidentifikasi dengan lokasi geografis, tetapi sekarang tinggal di tempat lain. Secara historis, diaspora digunakan untuk merujuk pada penyebaran massal suatu populasi dari wilayah adatnya, khususnya penyebaran orang Yahudi ke negeri-negeri di luar Palestina setelah penawanan Babilonia (Sheffer, 2003). Sampai baru-baru ini, pengalaman sejarah Yahudi memberikan pola dasar bagi diaspora, yaitu: pengusiran paksa dan pembubaran, penganiayaan, perbudakan, rasisme, rasa kehilangan, dan visi untuk kembali. Namun, selama sekitar satu dekade terakhir, "diaspora" telah menjadi istilah identifikasi diri di antara berbagai kelompok etnis atau nasional yang bermigrasi atau yang leluhurnya bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa selalu akibat dari keterpaksaan oleh pihak lain, namun berdasarkan kesukarelaan untuk berbagai alasan subjektif (Shain & Barth., 2003).

Diaspora sebagai orang dengan asal usul yang sama yang tinggal secara relatif permanen, di luar batas tanah air etnis atau agama mereka, baik tanah air itu nyata atau simbolis, merdeka atau di bawah kendali asing (Butler, 2001). Anggota diaspora mengidentifikasi diri mereka sendiri, atau diidentifikasi oleh orang lain di dalam dan di luar tanah air mereka sebagai bagian dari komunitas nasional tanah air, dan karena itu sering dipanggil untuk berpartisipasi, atau terjerat, dalam urusan yang berhubungan dengan tanah air (Shain, 1989). Dalam melakukan hubungan internasional, diaspora adalah aktor non-negara yang berinteraksi dengan aktor negara, terutama negara tuan rumah atau negara tempat mereka tinggal dan negara asal atau tanah air mereka. Mereka memiliki peran unik dalam hubungan internasional karena mereka berada di antara dua negara, berbagi dalam dua budaya, memiliki investasi emosional di dua negara, dan menjaga hubungan sosial dalam dua masyarakat. Mereka telah memengaruhi politik internasional sejak zaman kuno dan mereka terus melakukannya hingga hari ini.

Para sarjana dari beragam bidang ilmu telah membedakan antara berbagai jenis diaspora, berdasarkan penyebabnya seperti kolonialisme, perdagangan atau migrasi tenaga kerja, atau berdasarkan jenis koherensi sosial dalam komunitas diaspora dan hubungannya dengan tanah leluhur. Robin Cohen (1999) mengemukakan ciri-ciri umum diaspora sebagai: penyebaran dari tanah air asli; perluasan dari tanah air untuk mencari pekerjaan; memori kolektif dan mitos tentang tanah air, termasuk lokasi, sejarah, penderitaan, dan pencapaiannya; rumah leluhur yang dibayangkan dan komitmen kolektif untuk pemeliharaan, pemulihan, keamanan, dan kemakmurannya, bahkan hingga

penciptaannya; sering berkembangnya gerakan kembali ke tanah air; kesadaran kelompok etnis yang kuat (transmisi warisan budaya dan agama yang sama dan kepercayaan akan nasib yang sama); hubungan bermasalah dengan masyarakat tuan rumah; rasa empati dan tanggung jawab bersama dengan sesama anggota etnis di negara lain; memperkaya kehidupan di negara tuan rumah dengan toleransi terhadap pluralisme. Vertovec (1997) dan Cohen merangkum temuan dari sejumlah besar literatur para sarjana untuk membedakan empat makna diaspora.

Pertama, diaspora sebagai bentuk sosial, yaitu jenis hubungan sosial khusus antara diaspora (misalnya, berdasarkan praktik migrasi dan hubungan yang berkelanjutan dengan tanah air), ketegangan dalam orientasi politik yang timbul dari loyalitas yang terbagi antara tanah air dan tuan rumah masyarakat, dan strategi ekonomi tertentu, seperti pemberian bantuan kepada anggota keluarga yang bermigrasi, pengiriman uang ke kerabat dan saudara di tanah air, dan pengumpulan sumber daya. *Kedua*, diaspora sebagai jenis kesadaran. Komunitas diaspora secara sadar merupakan bagian dari kelompok etnonasional. Kesadaran ini mengikat orang-orang yang terpecah tidak hanya dengan tanah air tetapi juga satu sama lain. Khususnya dalam kasus diaspora yang tanah airnya tidak ada lagi, atau yang telah terpisah dari tanah airnya selama beberapa generasi, elemen identitas yang dipegang dan dibangun secara sadar ini sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka sebagai unit budaya. Jadi, sementara semua diaspora mungkin merupakan "komunitas imajiner", hanya komunitas yang dibayangkan dengan cara tertentu yang disebut diaspora. *Ketiga*, diaspora sebagai cara produksi budaya yang telah melompat dari identitas etnis dan budaya lokal tanah air mereka dan melintasi garis nasional kepada nilai-nilai dan produk-produk budaya hibriditas dan liminalitas (Vertovec S. , 1997). Melalui persinggungan dengan identitas etnik dan pribumi, dalam bidang ekonomi dan budaya. Hibriditas nilai dan kebiasaan ini, daripada sekadar pelestarian identitas etnis dan nilai-nilai tanah air seperti yang ditekankan oleh citra tradisional komunitas diaspora, berfungsi sebagai dasar untuk diasporisasi dan keabadian diaspora. *Keempat*, yaitu diaspora sebagai orientasi politik, yaitu bagaimana keterikatan diaspora pada politik tanah air dapat berdampak negatif dan positif pada negara-negara di kedua ujung rantai migrasi (Cohen, 1999).

Donald M. Nonini menambahkan dimensi temporal sejarah, yaitu keberadaan diaspora selama setidaknya dua generasi di 'pengasingan' sementara. Diaspora bersifat

multi-generasi, mereka menggabungkan pengalaman migrasi individu dengan sejarah kolektif penyebaran kelompok dan regenerasi komunitas di luar negeri diaspora (Nonini, 2002). Definisi-definisi seperti itu membantu menyaring klaim status diaspora.

Selama dua dekade terakhir, diaspora dan jaringan-jaringan ragam diaspora semakin menjadi pemain penting dan terlihat di arena politik dan ekonomi internasional, setelah lama keberadaan, identitas dan aktivitas mereka tersamarkan. Baik laporan media maupun studi akademis menunjukkan pengaruh diaspora pada perilaku internasional dalam banyak kasus, seperti diaspora asal Armenia, Cina, Kroasia, Kuba, India, Iran, Irlandia, Yahudi, Palestina, Sikh, dan Tamil (Khara, 2020). Diaspora ini dan banyak lainnya telah memengaruhi urusan dunia dalam berbagai cara pasif dan aktif atau konstruktif dan destruktif.

Diaspora menjadi aktor pasif ketika mereka terlibat dalam hubungan internasional bukan karena perbuatannya sendiri. Dalam hal ini adalah ketika mereka diminta bantuan, menjadi perwakilan dan menjadi tertuduh karena status dirinya sebagai diaspora di negara lain. Diaspora dapat menjadi aktor aktif, yaitu memengaruhi kebijakan luar negeri negara tuan rumah dan kebijakan luar negeri negara asal mereka (Shain & Barth., 2003). Motivasi yang mendorong diaspora untuk aktif memengaruhi kebijakan luar negeri negara asal itu didasari oleh persepsi mereka bahwa kebijakan luar negeri negara asal mengancam identitas etnis negeri negara asal atau identitas leluhur mereka; mengancam keamanan dalam negeri negara asal dalam banyak aspek terkait kepentingan diaspora; mengancam kepentingan kelompok tertentu diaspora secara eksistensial dan material; dan mengancam *raison d'être* organisasi diaspora (lihat Shain & Barth, 2003: 455-456). Sementara kegiatan diaspora yang konstruktif meliputi remitansi individu dan kolektif, investasi produktif dan pendanaan proyek-proyek pembangunan, promosi perdagangan, alih pengetahuan dan teknologi ke negara asal. Mereka berkontribusi dalam pendapatan pariwisata, kegiatan dalam penanggulangan bencana, pencegahan konflik, pembangunan perdamaian, atau rekonstruksi pasca konflik, kegiatan politik migran di negara tujuan, dan lain sebagainya (Brinkerhoff 2008). Sedangkan kegiatan diaspora yang dianggap destruktif termasuk kegiatan yang memicu dan mendanai konflik bersenjata atau terorisme baik di negara asal maupun negara tujuan (Vertovec S. , 2005). Aktivis diaspora mungkin menjadi sumber utama kekerasan dan ketidakstabilan di tanah air mereka, dan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan pemberontakan. Bahkan diaspora juga

dapat menjadi aktor dalam apa yang disebut oleh Samuel Huntington sebagai “benturan peradaban” (Pathak, 2017).

Ada banyak alasan mengapa, selama beberapa dekade terakhir, diaspora semacam itu menjadi lebih menonjol di panggung dunia. Antara lain, teknologi transportasi dan komunikasi baru telah meningkatkan kemampuan untuk memobilisasi, dan kebijakan multikulturalisme di negara penerima telah merevitalisasi kebanggaan dan ketegasan etnis. Pertumbuhan sumber daya ekonomi karena membengkaknya jumlah migran, dan perubahan besar dalam sistem politik dunia ketika negara-bangsa yang lebih demokratis muncul setelah jatuhnya rezim komunis. Dalam berbagai bidang kebijakan saat ini, termasuk urusan luar negeri, pembangunan ekonomi, dan migrasi internasional, diaspora semakin perlu dipertimbangkan. Selain itu, proses globalisasi telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan negara-negara bangsa mampu melihat melampaui batas-batas nasional yang kaku untuk aspirasi ekonomi dan pembangunan lainnya dari rakyat. Dunia tidak hanya diatur secara vertikal oleh negara-negara bangsa dan wilayah, tetapi secara horizontal oleh sistem interaksi ganda yang tumpang tindih, dan mudah tembus (*permeable*). Ruang untuk berbagai afiliasi dan asosiasi yang telah dibuka di luar dan di luar negara bangsa kini telah memungkinkan kesetiaan diaspora menjadi lebih terbuka dan lebih dapat diterima (Pathak, 2017).

Mengingat pentingnya diaspora, dan status mereka sebagai fitur permanen dalam sistem negara-bangsa yang tidak sempurna, diaspora sekarang mendapat perhatian yang semakin besar dari para pembuat keputusan di seluruh dunia. Demikian pula, studi tentang diaspora dewasa ini merupakan industri intelektual yang berkembang, dengan banyak konferensi akademis dan tulisan-tulisan yang ditujukan untuk subjek tersebut. Berbagai disiplin ilmu seperti Sosiologi, Antropologi, Geografi, Ilmu Politik dan lainnya mempelajari diaspora. Kecuali dalam Hubungan Internasional (HI), diaspora adalah wilayah kajian yang diremehkan. Meskipun semakin diakui pentingnya diaspora dalam urusan internasional, belum ada upaya serius untuk memasukkan fenomena ini ke dalam teori Hubungan Internasional. Padahal beberapa teori arus utamanya, yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme serta feminisme dalam HI dapat digunakan sebagai prisma dan pisau analisis untuk membahas serta memahami apa dan bagaimana kegiatan diaspora, dan juga bagaimana kajian tentang kegiatan internasional diaspora dapat memperkaya pendekatan hubungan internasional yang ada.

Bagi realisme klasik dan neorealisme, sistem internasional yang didominasi negara tidak membiarkan ada celah sedikitpun bagi keberadaan diaspora internasional. Bahkan kata diaspora tak disebut di dalam literatur para ahli terkemuka realisme dalam HI. Mulai dari Hobbes, Morgenthau dan Kenneth Waltz yang menegaskan negara adalah aktor kesatuan dan utama dalam dunia anarkis, sehingga diaspora tidak dipandang sebagai aktor politik yang signifikan. Obsesi terhadap sentrisme negara dan anarki tidak menyisakan ruang bagi komunitas diaspora sebagai aktor. Bahkan sebagai negara yang mengutamakan identitas kesatuan, domestik di luar negeri terabaikan sebagai komponen negara yang dapat memberikan pengaruh bahkan setelah tetap berada di luar batas negara (Das, 2014). Namun, teori realis tertentu telah berusaha untuk menempatkan diaspora dalam kerangka analitik realisme dengan mempertimbangkan diaspora sebagai perpanjangan dari negara dengan peran untuk mempromosikan kepentingan nasional tanah air (Craven, 2018). Realisme moderat ini mencatat bahwa diaspora dapat memengaruhi kebijakan luar negeri negara tuan rumah hanya jika tujuan kebijakan diaspora sesuai dengan, atau tidak mengancam, kepentingan nasional negara tuan rumah. Diaspora dimobilisasi sebagai sumberdaya kekuatan potensial (*manpower/hard power*) sekaligus sebagai instrumen *soft power* dalam ranah strategi kebijakan luar negeri dan juga sebagai agen atau katalisator pembangunan ekonomi negara asal di samping peran aktifnya di negara tuan rumah (Khara, 2020). Pemerintah negara asal maupun negara tuan rumah memberikan fasilitas bagi diplomasi diaspora untuk kepentingan negara masing-masing, memajukan hubungannya dengan negara tertentu mereka, atau untuk memoles profil globalnya sendiri sebagai negara yang mempraktikkan kebijakan yang mencerahkan (Rana, 2013).

Liberalisme mengakui bahwa aktor non-negara dapat berperan dalam hubungan internasional. Mereka adalah individu dan kelompok swasta yang berjuang untuk mempromosikan kepentingan yang berbeda. Salah satu aktor non-negara itu adalah diaspora. Sebagai kelompok yang dimobilisasi dengan rasa identitas yang kuat, diaspora dapat memainkan peran baik dalam politik domestik maupun internasional. Sejauh menyangkut politik domestik, diaspora dapat memengaruhi politik domestik tanah air dan politik domestik negara tuan rumah mereka mengenai isu-isu yang menurut mereka menarik. Di dalam proses politik domestik, diaspora dihadirkan dan menghadirkan diri sebagai aktor penyela yang membawa mereka menjadi kelompok kepentingan maupun

kelompok penekan. Mereka sering dianggap sebagai aktor domestik oleh tanah air meskipun mereka berada di luar negara-bangsa dan telah menjadi warga negara tuan rumah. Suara elektoral dan nilai diplomatik mereka bernilai, diperlukan dan diperebutkan. Bagaimanapun, sebagai kelompok kepentingan diaspora dapat juga menggunakan kekuatan apa pun yang mereka bisa untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Seperti menggunakan sumber daya keuangan mereka ke berbagai proyek donasi kepada masyarakat sipil, maupun kepada partai politik dan kandidat pilihan mereka. Dalam banyak kasus, masukan keuangan mereka dianggap sebagai pembenaran suara politik yang melancarkan mereka sebagai kelompok penekan (Moravcsik, 1997).

Sebagai aktor hubungan internasional dan transnasional, masyarakat diaspora telah berhasil membuat jaringan hubungan saling ketergantungan kompleks neo-liberal seperti yang diteorikan oleh Keohane dan Nye (2011). Jejaring yang mereka bina di antaranya dalam bidang bantuan luar negeri, finansial, modal dan investasi asing serta hubungan bisnis dan perdagangan dan ilmu dan teknologi yang diperlukan dalam pembangunan nasional dan internasional. Ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri nasional maupun keputusan organisasi internasional dan global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka bertindak tidak hanya sebagai jembatan atau mediator dan pelobi antara tanah air dan negara tuan rumah, melainkan sebagai aktor internasional yang mandiri dan memiliki kekuatan penuh untuk memajukan kepentingan sendiri berbasis keunikan dan keistimewaan jatidiri kolektif mereka.

Konstruktivisme, seperti yang dikemukakan oleh Alexander Wendt (1999), memandang negara sebagai aktor sosial dan pemain peran yang digerakkan oleh aturan, mencari ekspresi identitas dan diatur oleh logika kepatutan (*logic of appropriateness*). Kepentingan negara dianggap endogen dan variabel yang dipengaruhi terutama oleh identitas nasional yang dibentuk oleh kekuatan internasional dan domestik yang mencakup masyarakat di dalamnya. Perubahan identitas negara memengaruhi kepentingan atau kebijakan negara. Proses konstruksi identitas terjadi melalui praktik diskursif yang dikontestasikan di arena domestik dan internasional. Terkait hal identitas ini diaspora sebagai bagian dari masyarakat di luar ruang lingkup negara-bangsa menjadi relevan dan signifikan. Apakah mereka 'tersebar' oleh kekuatan imperial atau perang atau kelaparan atau oleh peluang ekonomi, sebagai diaspora mereka telah berusaha untuk

mempertahankan sistem afiliasi dengan tempat asal mereka dan mempertahankan ingatan dan menciptakan mitos tentang tanah air yang dapat berfungsi sebagai narasi yang kuat tentang pembentukan identitas (Kennedy, 2022). Oleh karena itu diaspora kerap terlibat dalam upaya untuk membentuk identitas nasional, namun bukan semata untuk memperoleh keuntungan melalui pengaruhnya atas kepentingan (materi), tetapi terutama karena kepentingan mereka untuk memastikan dan mempertahankan identitas yang melanggengkan dan memelihara citra diri mereka. Sementara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam negara dapat memanfaatkan sentimen kebangsaan etnis diaspora untuk mendukung diskursus identitas bersama. Dengan demikian, konstruktivis yang berurusan dengan proses politik ini harus memperhitungkan diaspora sebagai aktor yang sangat termotivasi dan mampu terlibat dalam persaingan konstruksi identitas di dalam maupun di luar negeri.

Mengenderkan diaspora dalam hubungan internasional menjadi perhatian kajian feminisme dalam Hubungan Internasional, menyusul rekan-rekan feminis dari bidang studi yang lain. Para feminis dengan lensa gender dan seksualitasnya mampu menyingkap dimensi lain dan terpendam di dalam diskursus dan praktik diaspora. Mereka mengeksplorasi interkoneksi antara seksualitas dan diaspora, menyelidiki cara ras, kelas, gender, dan seksualitas bersinggungan dengan gagasan tentang ‘rumah’ dan ‘penyebaran’ (Mehta, 2015) Menurut feminis, diaspora bukanlah konsep yang homogen dan juga bukan pengalaman satu dimensi seperti yang disiratkan dari kata dan makna diaspora yang berlaku umum. Makna diaspora sebagai penyebaran atau penyebaran ‘benih’ cenderung bias gender dan androsentris yang memberi hak istimewa pada mobilitas subjek maskulin, yaitu para lelaki, yang dianggap mampu bertransformasi dan beregenerasi di persemaian baru. Lelaki menjadi agen utama pembentukan diaspora dan melanggengkan maskulinisme yang lebih umum dalam konseptualisasi komunitas diaspora (Mehta, 2015). Selain itu dalam sistem patriarki, penyebaran lelaki ke luar rumah dan ke luar wilayahnya dianggap sebagai yang wajar dan kodrati maskulinitas bagi mereka membuktikan keunggulan seksualitas dan tuntutan gendernya setelah mereka kembali. Oleh karena itu ikatan emosi dan memori serta obsesi untuk ‘pulang’ ke tanah air para lelaki diaspora adalah legasi bergender.

Pada dimensi lainnya, kebanyakan perempuan sebagai diaspora disebabkan konsekuensi gendernya sebagai yang terikut, terikat dan tergantung kepada lelaki/suami

yang tersebar ke luar negeri. Sementara 'tinggal di tempat' (di rumah atau ranah privat/domestik), sebagai lawan dari 'penyebaran' (ke luar rumah atau ranah publik) adalah karakteristik feminin bagi perempuan (Brah, 1996). Sekalipun perempuan bermigrasi atas kehendak sendiri untuk bekerja di luar negeri, mereka dianggap telah melanggar kodrat gendersnya, serta kesempatan dan peluang yang tersedia bagi mereka terbatas dalam sistem pembagian kerja internasional yang timpang. Pekerjaan perempuan migran masih di sekitar pekerjaan feminin di rumah tangga dan pelipuran dengan tubuh dan seksualitasnya sebagai taruhan. Dengan demikian, pengalaman diaspora bergender yang dialami oleh lelaki dan perempuan di negara penerima dan negara asal membawa beban asumsi patriarki tradisional bersamanya (Mehta, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa diaspora tidak hanya merupakan subjek-subjek yang tercerabut dari negara asalnya di masa lalu, melainkan pelaku hubungan internasional yang semakin terlihat dan tidak bisa diabaikan signifikansinya di masa kini. Dalam hubungan bilateral antarnegara yang terkait dengan dirinya, diaspora berlaku sebagai jembatan politik dan budaya, dan adalah duta budaya *de facto* bagi kedua negara yang perlu diperhitungkan. Demikian pula suara internasional diaspora yang semakin kuat, baik sebagai kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam pembuatan kebijakan luar negeri nasional maupun organisasi internasional yang perlu diperhatikan sekaligus diwaspadai. Sebagai jaringan masyarakat sipil transnasional yang unik dan istimewa diaspora dapat diarahkan dan dimanfaatkan keagenan dan kontribusinya bagi perubahan positif politik dan ekonomi global, promosi perdamaian dan pembangunan internasional. Dalam hal ini kajian Hubungan Internasional dapat mengawal arah perkembangannya melalui penelitian-penelitian tentang diaspora yang bermanfaat bagi dunia.

INTERMESTIC Volume 6 Nomor 2 pada Mei 2022 memuat tiga artikel yang membahas mengenai diaspora dalam hubungan internasional. Seperti artikel keenam dengan judul "*Manifestasi Nasionalisme Diaspora Armenia dan Azerbaijan dalam Konflik Nagorno-Karabakh*" ditulis oleh Rahayu A.H. Simangunsong dan Ani W. Soetjipto. Artikel ini membahas mengenai bagaimana ide nasionalisme yang dimiliki diaspora terwujud dalam konflik di tanah air melalui studi kasus komparatif nasionalisme diaspora Armenia dan Azerbaijan dalam Konflik Nagorno-Karabakh. Dianalisis dengan menggunakan faktor yang mempengaruhi efektivitas aktivitas diaspora dari Shain & Barth (2003). Artikel ini menunjukkan bahwa manifestasi nasionalisme diaspora Armenia

cenderung radikal, sementara nasionalisme diaspora Azerbaijan cenderung moderat; dan juga menemukan bahwa ada berbagai aspek selain nasionalisme yang memengaruhi dinamika aktivisme diaspora. Berikutnya, artikel ketujuh dengan tema diaspora yang berjudul “*Hometown Transnationalism and The Emergence of Indonesian Diaspora Organizations in Europe*” ditulis oleh Meilinda Sari Yayusman and Ayu Nova Lissandhi. Artikel ini menjelaskan pergerakan dan inisiasi diaspora Indonesia untuk menciptakan aktivitas baru di era globalisasi. Pembahasan berfokus pada organisasi diaspora Indonesia di Eropa, yaitu Indonesian Diaspora Networks (IDN) di Belanda dan Prancis. Konsep *hometown transnationalism* digunakan untuk menjelaskan remitansi kolektif, yakni kontribusi melalui proyek-proyek pembangunan sebagai wujud upaya diaspora untuk negara asal diaspora. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemunculan berbagai organisasi diaspora merupakan dampak dari semakin cepatnya pergerakan manusia dan perkembangan teknologi, sehingga mendorong diaspora untuk lebih terkoneksi dengan kampung halaman. IDN Belanda dan IDN Prancis memiliki peran penting dalam merealisasikan cita-cita diaspora untuk membangun Indonesia dengan cara yang beragam. Kajian mengenai diaspora lainnya pada artikel kedelapan berjudul “*Diplomasi Diaspora Tiongkok Terhadap Hubungan Bilateral Amerika Serikat-Tiongkok (2017-2021)*” oleh Imanniar Gadis Diandono dan Adiasri Putri Purbantina. Fenomena diplomasi diaspora oleh Cina terhadap hubungan bilateral Cina dan Amerika Serikat pada tahun 2017-2021 dieksplorasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi kasus. Diplomasi diaspora sebagai instrumen diplomasi publik yang memperkenalkan budaya, etnis, dan identitas nasional negara asal kepada masyarakat tuan rumah. Artikel ini menemukan bahwa diaspora Cina di Amerika Serikat berperan sebagai penghubung antara negara tuan rumah dan negara asal, dengan berperan dalam memperkuat hubungan ekonomi. Kegiatan diaspora Cina melalui Institut Konfusius menunjukkan proses internasionalisasi budaya, etnis, dan identitas nasional sebagai alat komunikasi strategis yang meningkatkan hubungan bilateral antara Cina dan Amerika Serikat meskipun belum menunjukkan fungsi *peacebuilding* dan memberikan alternatif visi politik bagi negara asalnya.

Artikel-artikel berikutnya tidak mengambil tema diaspora, melainkan bertema menarik dan bermanfaat lainnya dalam lingkup Hubungan Internasional dan Intermestik. Artikel pada urutan pertama, “*Increasing Participation of Non-State Actors in ASEAN:*

Problems and Options” oleh Ludiro Madu dan Hestutomo Restu Kuncoro; artikel kedua, “*Persaingan Kekuasaan Antara India dan Tiongkok: Dari Kekuasaan Militer Sampai Dengan Konflik Siber*” oleh Refika Febrianti, Abubakar Eby Hara, dan Bagus Sigit Sunarko; artikel ketiga, “*ASEAN’s External Economic Relations and The Limits of its Economic Diplomacy*” oleh Pantri Muthriana Erza Killian; Artikel keempat, “*Diplomasi Wolf Warrior Tiongkok dan Relasi Tiongkok-Australia di Masa Pandemi Covid-19*” oleh Hayati Nufus, Khanisa dan R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas; Artikel kelima “*Facing The Dangers in Indonesia’s Waters: Government’s Efforts in Proposing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing as Transnational Organized Crime*” oleh Elyta, Dadang I. K. Mujiono dan Uni W. Sagena; artikel kesembilan, “*China’s Perspectives on Multilateralism: A Preliminary Exploration of The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*” oleh Emilia Kurniasari, Asra Virgianita dan Ardhitya Eduard Yeremia; artikel kesepuluh “*Rational Choices in Sino-Indian Border Dispute in Aksai*” oleh Angel Damayanti dan Bryan Libertho Karyoprawiro; dan artikel terakhir, yaitu “*Japan in The South China Sea: Restricted yet Strategic?*” oleh Archangela Rachel Dharmaputri dan Idil Syawfi.

Akhir kata, kami menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga atas kesediaan para mitra bestari dan para penulis sebagai kontributor dalam mewujudkan penerbitan e-Jurnal INTERMESTIC Volume 6 Nomor 2 pada Mei 2022 ini.

Hormat kami,

Arry Bainus dan Junita Budi Rachman

Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi

Referensi

- Brah, A. (1996). *Diaspora, Border and Transnational Identities*. In A. Brah, *Cartographies of Diaspora. Contesting Identities* (pp. 178–210.). London, New York: Routledge,.
- Butler, K. D. (2001). *Defining Diaspora, Refining a Discourse*. *Diaspora*, 10(2).
- Cohen, R. (1996). *Diasporas and the nation-state: From victims to challengers*. *International Affairs*, 72(3), 507–520. doi:10.2307/2625554
- Cohen, R. (1999). *Global Diasporas: An Introduction*. 2nd ed. London: Routledge.
- Craven, C. R. (2018). *Thinking About Governance Through Diasporas, Decentering the State and Challenging the External/Internal Binary*. *SFB-Governance Working Paper Series*, 76.
- Das, L. (2014). *Theoretical Conceptualization of International Diaspora*. *Indian Streams Research Journal*, 4(5), 1-8,.

- Kennedy, L. (2022). Introduction. In L. Kennedy, *Routledge International Handbook of Diaspora Diplomacy*. New York: Routledge International.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2011). *Power and Interdependence, 4th Edition*. Boston: Longman.
- Khara, N. K. (2020). Diaspora and Foreign Policy: A Global Perspective. In *International Journal of Political Science (IJPS)* , 6(4), 12-20. doi:doi.org/10.20431/2454-9452.0604002
- Mehta, S. R. (2015). Introduction, Revisiting Gendered Spaces in The Diaspora. In S. R. Mehta, *Exploring Gender in The Literature of the Indian Diaspora* (pp. 4-7). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
- Moravcsik, A. (1997). Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. *International Organization* 51 ~4!:513–53, 51(4), 513-553.
- Nonini, D. M. (2002). Introduction: Transnational migrants, globalization processes, and regimes of power and knowledge. *Critical Asian Studies*, 34(1), 3-17.
- Pathak, V. (2017). Diaspora in International Relations: Emerging Role of Indian Diaspora. *The Signage*, 5(2).
- Rana, K. S. (2013). Introduction. In K. S. Rana, *Diaspora Diplomacy and Public Diplomacy*. London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Safran, W. (1991). Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 1(1), 83-99.
- Shain, Y. (1989). *The Frontier of Loyalty: Political Exiles in the Age of the Nation-State*. Middletown Conn: Wesleyan University Press.
- Shain, Y. & Barth., A. (2003). Diaspora nd International Relations Theory. *International Organization*, 57(3), 449-479. doi:10.1017/S0020818303573015
- Sheffer, G. (2003). Primary Questions and Hypotheses, Clarification of Terms. In G. Sheffer, *Diaspora Politics at Home Abroad* (p. 8). Cambridge: Cambridge University Press.
- Vertovec, S. (1997). Three Meanings of Diaspora, Exemplified Among South Asian Religions. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies.*, 6(3), 227-299.
- Vertovec, S. (2005). The political Importance of Diasporas. In *Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford, Working paper, 13*.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.